

SDK : ‘Sumber Daya Koruptor’ dari Soekarno sampai Susilo

....

*Berburu ke padang datar
Mendapat janda belang di kaki
Koruptor sakit diijinkan pesiar
Uang rakyat dibawa lari*

*Berakit rakit ke hulu
Berenangnya kapan kapan
Maling kecil sakit melulu
Maling besar dimuliakan*

(Pantun Koruptor-WS Rendra)

Sepenggal pantun tentang koruptor di atas patut menjadi cerminan terhadap apa yang sedang terjadi di negara ini. Rentetan kasus korupsi yang tersaji dalam berbagai pemberitaan seakan menjadi bukti bahwa korupsi adalah penyakit lama yang sulit untuk disembuhkan. Penetapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dua kasus dugaan suap menambah daftar panjang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Menjadi buah bibir di masyarakat ketika Mahkamah Konstitusi yang notabene merupakan lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman tersandung dengan kasus korupsi. Tak segan-segan kasus korupsi tersebut melibatkan langsung ketuanya. Akil Mochtar yang menentang korupsi di tanah air melalui bukunya yang berjudul *Memberantas Korupsi : Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi* berbalik terjerat dengan apa yang ditentanginya tersebut.

Belum tuntas pengusutan satu kasus korupsi, kasus-kasus yang lain pun datang silih berganti. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara menjadi ‘sangat menarik’ ketika melibatkan berbagai pihak termasuk juga salah satu artis ibukota bahkan salah satu ketua partai yang cukup diperhitungkan di negara ini. Sekali lagi, korupsi menjadi penyakit baik bagi pelakunya maupun bagi rakyat dan negara yang terkena imbasnya. Tak heran jika Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negeri dengan Sumber Daya Manusia melimpah tetapi juga negeri dengan ‘Sumber Daya Koruptor’ yang tidak ada habisnya.

Apa dan Mengapa Korupsi ?

“Ada yang tidak jelas bagi pengetahuan publik, apakah itu korupsi, penyalahgunaan atau ketidaktahan.” Begitulah pandangan dari Ketua Tim Kerja Antikorupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Munir Mul Khan yang dikutip dari harian Kompas 22 Agustus 2005. Jelas bahwa masih banyak yang tidak mengetahui apa dan bagaimana korupsi itu sebenarnya. Bisa saja apa yang kita lakukan secara tidak sengaja termasuk dalam kriteria korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang berarti buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Ada berbagai motif mengapa korupsi itu dilakukan, mulai dari sifat hingga keterpaksaan. Menurut penelitian para pakar, korupsi dapat bersumber dari moral yang mulai terdegradasi, sifat serakah yang ada dalam diri pelaku korupsi, gaya hidup konsumtif, serta kebutuhan hidup yang mendesak.

Korupsi sejatinya bukan merupakan barang baru bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah terjadi secara mengakar dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lihat saja salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya kerajaan yang gagal atau runtuh disaat mencapai puncak dan kejayaan hanya karena korupsi. Korupsi yang terjadi di setiap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia pun memiliki warna yang berbeda-beda. Seakan turun temurun, korupsi diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Di era kepemimpinan Soekarno misalnya, dalam penerapan Politik Benteng untuk melindungi pengusaha pribumi justru menumbuhkan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Aparat negara tak bekerja dengan baik dan korupsi semakin merajalela. Ungkapan 'Asal Bapak Senang' seakan menjadi cerminan dalam kepemimpinan Soeharto. Nepotisme menjadi satu praktik yang kuat dalam pemerintahannya. Pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran utama, dengan jalan terus mengontrol kekuasaan politik agar dapat menjalankan program pembangunan. Persoalan kebocoran atau korupsi menjadi persoalan nomor dua.

Di era Habibie, salah satu agenda kaum reformis yang menumbangkan Orde Baru adalah pemberantasan KKN. Dibuktikan dengan adanya gagasan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun Pemerintahan Habibie tidak berhasil menyeret Soeharto ke pengadilan, justru menghentikan penyelidikan kasus tersebut lewat Jaksa Agung Andi M. Ghalib yang justru diduga kuat masyarakat sebagai koruptor.

Segera setelah dilantik menjadi Presiden RI, Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden No 44 tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 membentuk Lembaga Ombudsman yang mempunyai wewenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara. Pemerintah juga menyiapkan pembentukan Komisi Antikorupsi. Sayangnya, Pemerintahan Abdurrahman Wahid jatuh, karena persoalan yang mengakar yaitu tuduhan perilaku korupsi, seperti Buloggate dan Brunaigate.

Di masa pemerintahan Megawati pula kita dapat melihat wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Betapa mudahnya konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional.

Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih dua kali menjabat sebagai Presiden RI juga tak lepas dari banyaknya praktik korupsi selama pemerintahannya. Mulai dari Century, kasus mafia pajak Gayus Tambunan, hingga kader partainya yang tersangkut kasus korupsi wisma atlet SEA Games. Publik dibuat terkejut dengan satu per satu kasus korupsi yang diungkap oleh KPK. Kasus 'mega proyek' Bank Century menyita sebagian besar perhatian publik. Belum lagi penangkapan Kepala Satuan kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini yang diduga terlibat dalam kasus suap membuat banyak pihak tak menyangka, pasalnya ia digadang-gadang untuk memperbaiki badan pengelolaan migas yang memang rawan sekali dengan penyuaipan. Praktik korupsi yang melibatkan partai-partai politik di Indonesia juga tak luput dari perhatian. Mulai dari kasus yang menyeret bendahara partai, Nazaruddin hingga kasus dugaan suap impor daging sapi yang menjerat mantan presiden salah satu partai besar di Indonesia, Luthfi Hasan Ishaq.

Korupsi Turun Temurun, Ketika Hukum Tak Lagi Dihormati ?

Apakah penegakan hukum di Indonesia ini lemah sehingga korupsi semakin tumbuh subur ? Dalam buku *Strategi dan Teknik Korupsi*, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek. Pertama, bisa tidak adanya tindakan hukum sama sekali terhadap pelaku korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan dari penegak hukum atau bawahan dari penegak hukum yang menjadi penyokong utama yang membiayai operasional kegiatan si penegak hukum. Kedua, tindakan ada tetapi penanganan diulur-ulur dan sanksi peringanan. Ketiga, tidak dilakukan pemindahan sama sekali, karena si pelaku mendapat beking dari jajaran tertentu atau tindak pidana korupsinya bermotifkan kepentingan untuk kelompok tertentu atau partai tertentu.

Rumusan penyelewengan penggunaan uang negara telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton, yang hidup pada tahun 1834-1902 di Inggris. Beliau menyebutkan bahwa faktor kekuasaanlah yang menyebabkan korupsi. Adapun isi dari rumusan itu adalah *power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*, yang berarti kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula.

Berbagai kasus dan praktik korupsi yang ada di setiap generasi seolah mencerminkan bahwa penegakan hukum di Indonesia lemah dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. Hukum yang ada di Indonesia tidak dihormati lagi ketika para koruptor semakin tumbuh subur dan melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang kebal terhadap hukum. Sekali lagi penegakan hukum di Indonesia dipertanyakan ketika perbedaan perlakuan hukum terjadi hanya karena berdasarkan status, pangkat, golongan, maupun jabatan.

Pada akhirnya bangsa Indonesia harus mengingat-ingat kembali sebuah pembelajaran yang mungkin sering kita abaikan, kejujuran.